

**IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI
KESEHATAN PADA UPT. PUSKESMAS MARTAPURA 2 KABUPATEN BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Ulpah Mariani, M. Zainul, Khuzaini
Program pascasarjana Prodi Magister Manajemen
Universitas Islam Muhammad Arsyad Al-Banjari
ulpahofeq@gmail.com

ABSTRAK

Ulpah Mariani. NPM 2009020018. Studi Kualitatif: **Implementasi Sistem Informasi Kesehatan pada UPT. Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.** M. Zainul dan Khuzaini.

Permenkes nomor 31 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Kesehatan Pasal 3 menyebutkan bahwa Puskesmas wajib menyelenggarakan Sistem Informasi Puskesmas yang merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan kabupaten/kota yang dapat diselenggarakan secara elektronik dan/atau secara non elektronik. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan, Pelaksanaan sistem informasi kesehatan di UPT. Puskesmas Martapura 2 masih kurang optimal. Sistem yang digunakan belum berjalan optimal, Teknologi komputer yang tersedia menggunakan Sistem Operasi Windows, dimana membutuhkan SDM yang mengerti dengan IT, Kualitas jaringan internet sering mengalami gangguan konektivitas (Down Server/Down System).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan disain penelitian deskriptif untuk memperoleh dan menyajikan data secara maksimal dan menyeluruh sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Rumusan masalah dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan : Bagaimana Implementasi sistem informasi kesehatan pada UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Bagaimana kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengimplementasikan sistem informasi kesehatan pada UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi kendala implementasi sistem informasi kesehatan. Tujuan dari implementasi Sistem Informasi Kesehatan ini, yaitu : Mengetahui bagaimana Implementasi Sistem Informasi Kesehatan pada UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Mengetahui kemampuan Sumber Daya Manusia dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kesehatan pada UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak UPT Puskesmas Martapura 2 Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan dalam mengatasi kendala implementasi sistem informasi kesehatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi sistem informasi kesehatan dalam upaya memperkuat pelayanan kesehatan di UPT. Puskesmas Martapura 2 saat ini sudah terasa manfaatnya. Masalah Sumber Daya Manusia pada Implementasi Sistem Informasi Kesehatan juga ikut menjadi kendala, dimana tidak ada Sumber Daya Manusia (SDM) khusus di bidang Sistem

Informasi Kesehatan (SIK). Petugas yang ada sekarang ini mempunyai tugas pokok (tupoksi) lain jadi petugas SIK mempunyai tugas rangkap, serta tidak lengkap fasilitas penunjang dalam pelaksanaan SIK juga menjadi kendala dalam pelaksanaannya. UPT. Puskesmas Martapura 2 telah berupaya mengatasi kendala dalam implementasi sistem informasi kesehatan ini dengan Tata kelola sudah berjalan cukup baik hanya saja tidak ada SK kepengurusan pengimplementasian sistem informasi kesehatan sedangkan koordinasi sosialisasi sudah dilakukan sebelum pengimplementasian sistem informasi kesehatan, pelatihan dan bimbingan juga masih kurang; dan dari proses implementasi SIK adalah kurangnya SDM menyebabkan proses yang ada dalam pengimplementasian Sistem Informasi Kesehatan juga kurang.

Kata kunci : Implementasi, Sistem Informasi Kesehatan, Puskesmas Martapura 2.

ABSTRACT

Ulpah Mariani. NPM 2009020018. Qualitative Study: **Implementation of Health Information Systems in UPT. Puskesmas Martapura 2 Banjar Regency, South Kalimantan Province.** M. Zainul and Khuzaini.

Permenkes number 31 of 2019 concerning Health Information Systems Article 3 states that Puskesmas are required to organize a Puskesmas Information System which is part of the district/city health information system that can be held electronically and/or nonelectronically. Based on preliminary studies conducted, the implementation of the health information system at UPT. Puskesmas Martapura 2 is still not optimal. The system used has not run optimally, the computer technology available uses the Windows Operating System, which requires human resources who understand IT, Internet network quality often experiences connectivity problems (Down Server / Down System).

This research uses a qualitative approach, using descriptive research design to obtain and present data optimally and thoroughly in accordance with the theory used in the research. The formulation of the problem from this study is How to implement the health information system, what obstacles are faced in implementing the health information system and how the efforts made by upt. Puskesmas Martapura 2 in overcoming obstacles to the implementation of the health information system. The purpose of implementing this Health Information System is to find out how the Implementation of the Health Information System and find out what are the obstacles faced in implementing the Health Information System at the UPT Puskesmas Martapura 2 South Kalimantan Province, as well as to know the efforts made by the UPT. Puskesmas Martapura 2 in overcoming obstacles to the implementation of the health information system. The results of this study show that the implementation of the health information system in an effort to strengthen health services in UPT. Puskesmas Martapura 2 is currently feeling the benefits.

There are still obstacles in implementing the health information system, namely the Pharmacy service is still unable to carry out stock-taking because there is still old drug data that has not been isolated, and in the counter service, officers are still re-inputting to the pcare system, also often experiencing internet network disruptions, thus hindering the pace of service activities. UPT. Puskesmas Martapura 2 has tried to overcome obstacles in the implementation of this health information system with governance has gone quite well, it's just that there is no management decree for the implementation of the health information system while coordination of socialization has been carried out before the implementation of the health information system, training and guidance are also still lacking; and from the SIK implementation process is that the lack of human resources causes the existing processes in implementing the Health Information System to also be lacking.

Keywords: Implementation, Health Information System, Puskesmas Martapura 2

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, D, 2011, Manajemen Pelayanan Kesehatan, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Al-Assaf, AF, 2009, Mutu Pelayanan Kesehatan : Perspektif Internasional, Kedokteran EGC, Jakarta.
- _____, 2009, Mutu Pelayanan Kesehatan : Perspektif Internasional, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Bappenas, 2009, Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Kesehatan Yang Berkualitas, Diakses pada tanggal 21 Desember 2021, (<http://www.bappenas.go.id/file/9213/5022/6053/bab27.pdf>)
- Bustami, 2011, Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan dan Akseptabilitasnya, Erlangga, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar, 2020, Profil Kesehatan
- Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2020, Profil Kesehatan
- Hariyanto, D, dkk, 2013, Pengaruh Persepsi Mutu Pelayanan Terhadap Kepuasan Dan Kunjungan Pasien Di Puskesmas Ngantru Kabupaten Tulungagung, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume.2, No.2, juni 2013.
- Hayaza, YT, 2013, Analisis Kepuasan Pasien Terhadap Kualitas Pelayanan Kamar Obat Di Puskesmas Surabaya Utara, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2, No 2, 2013.
- Kemenkes RI, 2020, Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2021, Kemenkes RI, Jakarta.
- Marjati, dkk, 2014, Mutu Pelayanan Kesehatan dan Kebidanan, Salemba Medika, Jakarta.
- Mimin, et all, 2013, Analisis Kepuasan Pasien Rawat Inap Pada RS.Delima Asih Sisma Medika Karawang, Jurnal Manajemen, Volume 10, No. 3 April 2013.
- Mursyida, dkk, 2012, Kepuasan Ibu Hamil Dan Persepsi Kualitas Pelayanan Antenatal Care Di Puskesmas Tanjung Kabupaten Sampan Madura, Jurnal Media Kesehatan Masyarakat Indonesia, Volume 11-12, No. 174 - 181, April 2012.
- Notoatmodjo, S, 2010:104-164, Metodologi Penelitian Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.

Peraturan Bupati Banjar Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup Kabupaten Banjar, Martapura.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas, Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Jakarta.

Prasetyo B dan Jannah LM, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif : Teori dan Aplikasi, Rajawali Press, Jakarta.

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28H Ayat 1 Tahun 2009, Kesehatan, Jakarta

Undang - Undang Dasar Republik Indonesia No 36 Pasal 19 Tahun 2009, Kesehatan, Jakarta.

Wike, D, 2009, Kepuasan Pasien Rawat Inap Terhadap Pelayanan Perawat Di RSUD Tugurejo Semarang, Tesis, S2 UNDIP, Semarang.

Zaidin, 2009, Pengukuran Tingkat Kepuasan Pelayanan Untuk Menaikan Pasang Pasar, Rineka Cipta, Jakarta.

Azwar, A. (1996). Pengantar administrasi kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.

Barsasella, D. (2012). Sistem informasi kesehatan (hal. 35, 64-81). Jakarta: Mitra Wacana Medika.

Cresswell, K., & Sheikh, A. Organizational issues in the implementation and adoption of health information technology innovations: an interpretative review. *International Journal of Medical Informatics*, 2013; 82(5), e73–86. Retrieved from <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1386505612001992>

Kementerian Kesehatan RI. (2019). Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2019.

Diakses dari <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/datadasarpusesmas/2019/Data-Dasar-Puskesmas-kondisi-31-Des-2018-Nasional.pdf>.

Peraturan Pemerintah RI. (2012). Sistem informasi kesehatan. Jakarta: Pemerintah RI.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas.

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas.